

**BAB II**  
**KONDISI UMUM**

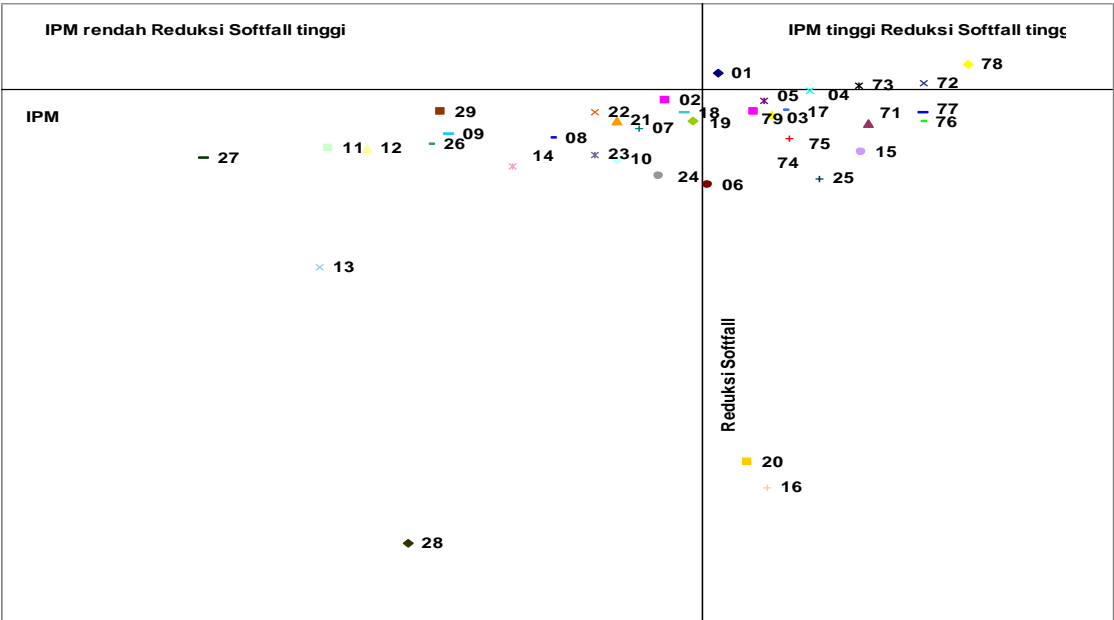
**A. Kondisi Saat Ini**

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Jawa Timur selama ini telah menunjukkan perkembangan yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya, ekonomi dan sarana prasarana wilayah.

**1. Sosial Budaya**

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2007 sebanyak 36.895.571 jiwa dengan kepadatan 798 jiwa/Km2. Dari jumlah tersebut yang tinggal diperkotaan sebesar 40,65% sedangkan penduduk perdesaan sebesar 59,35%. Jumlah penduduk yang besar tersebut merupakan sumber daya manusia yang dapat menjadi subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Namun demikian, kuantitas yang besar tersebut belum sebanding dengan kualitas yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari :

- a. Kinerja pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2007 mencapai 68,06 %. IPM terendah sebesar 53,24 dan tertinggi 75,05. Apabila dilihat dari perbandingan antar Kabupaten/Kota dan reduksi shortfall dalam 4 (empat) kuadran sebagaimana gambar 2.1 berikut :



Pada

Pada gambar 2.1 sebagian besar Kabupaten berada di kuadran III dan IV, artinya reduksi *shortfall* (ketertinggalan) lebih lambat dari rata-rata Jawa Timur. Terlihat pula bahwa hanya 4 Kabupaten/Kota saja yang menempati kuadran I ( mempunyai IPM tinggi dengan reduksi *shortfall* yang tinggi pula) dan tidak ada satupun Kabupaten/Kota yang menempati kuadran II ( mempunyai IPM rendah tetapi reduksi *shortfall* yang tinggi). Perlu usaha yang nyata untuk membenahi Kabupaten/Kota yang memiliki reduksi *shortfall* rendah, khususnya Kabupaten/Kota di daerah tapal kuda.

- b. Taraf pendidikan penduduk di Jawa Timur mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan menurunnya angka buta huruf penduduk usia 10-40 tahun dari 3,65 % pada tahun 2005 menjadi 3,47 % pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 mencapai 3,54%. Perbaikan tingkat pendidikan tersebut didorong oleh meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) atau persentasi penduduk yang bersekolah pada semua kelompok usia. Perkembangan APS tahun 2006 sampai dengan 2007 untuk penduduk usia 7-12 tahun meningkat dari 98,22 % menjadi 98,42%, penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari sebesar 85,98 %, menjadi 86,42% dan penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 56,77% menjadi 58,54%. Disamping itu untuk mengilustrasikan perkembangan pendidikan kejuruan yang mengarah kepada out put kelulusan dengan tingkat ketrampilan kerja yang diukur melalui ratio murid SMK dibanding dengan SMU tahun ajaran 2006/2007 mencapai 68,57 %. Di samping itu output pendidikan masih dihadapkan pada kompetensi lapangan kerja yang berpengaruh pada penyerapan angkatan kerja.
- c. Kinerja pembangunan kesehatan, pada tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang lebih baik, hal ini ditunjukkan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran penduduk menurun menjadi sebesar 32,93, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran menurun menjadi sebesar 349 dan Angka Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 87,89%. Namun demikian tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, serta tingginya balita kurang gizi masih menjadi masalah besar dalam membentuk generasi yang mandiri dan

dan berkualitas. Disamping itu usia harapan hidup yang menjadi pendukung Indeks Pembangunan Manusia mengalami perkembangan yang terus meningkat dan sampai dengan tahun 2007 mencapai 68,69.

- d. Kualitas tenaga kerja di Jawa Timur relatif masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh struktur tenaga kerja pada tahun 2007 berdasarkan tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD dan tidak tamat SD sebesar 57,99%, sedangkan untuk lulusan SLTP mencapai 16,35 %, dan SMTA sebesar 14,24%, serta diploma dan sarjana sebesar 4,63%. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang rendah berpengaruh kepada peluang memperoleh kesempatan kerja, hal ini disebabkan oleh rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Kondisi demikian akan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Data Sakernas 2008 menunjukkan bahwa TPT pada kelompok pendidikan rendah (SD) lebih kecil dibandingkan tingkat pendidikan di atasnya, hal ini disebabkan oleh kecenderungan kelompok penduduk berpendidikan rendah bersedia melakukan pekerjaan apa adanya sebagai pekerja bebas di sektor informal.

Selanjutnya untuk persebaran tenaga kerja sektoral, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mencapai 45 %. Tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian pada struktur pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang mencapai 16,66 %, menunjukkan tingkat pemerataan yang relatif tinggi, namun apabila dilihat dari tingkat produktivitas menunjukkan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut.

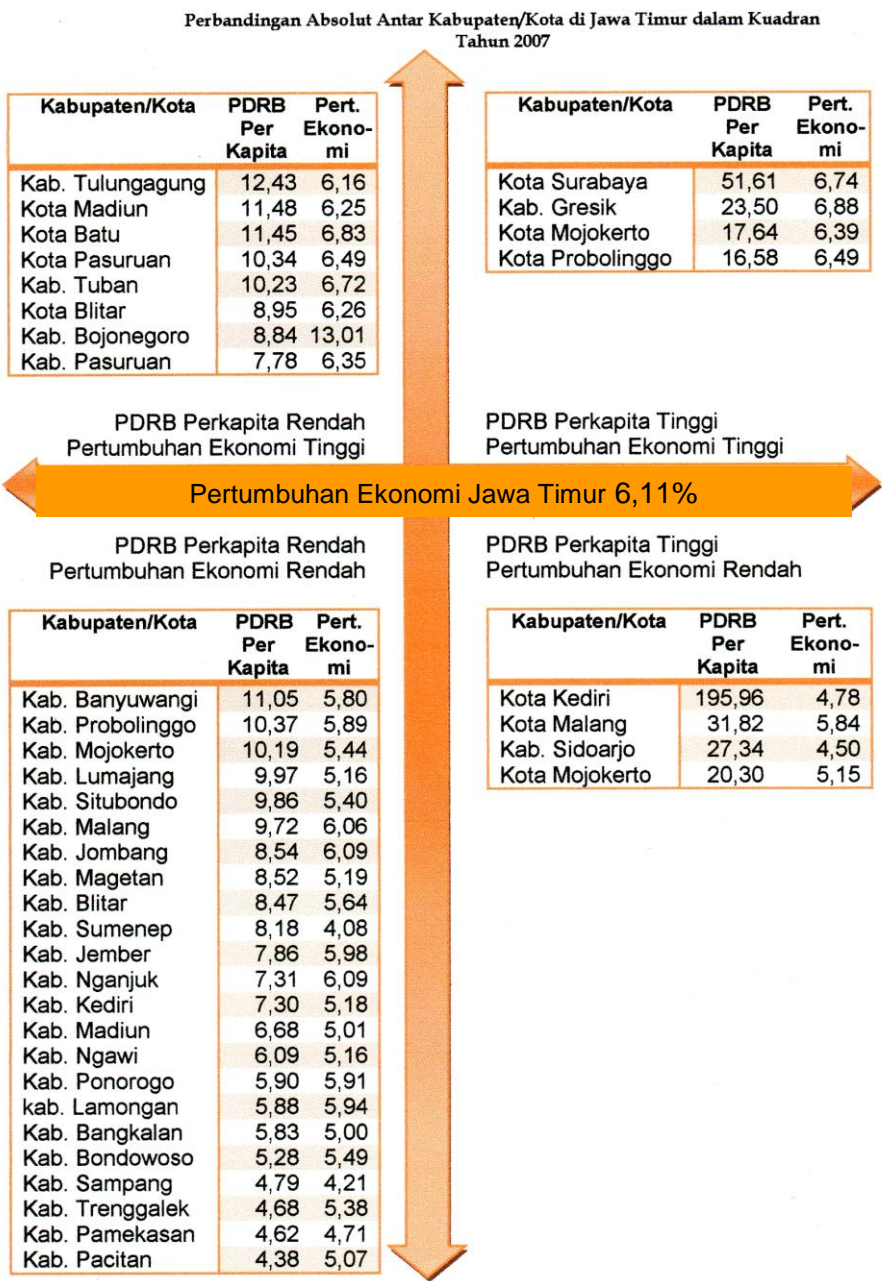
- e. Prosentase jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami penurunan dari 19,89 % pada tahun 2006 menjadi 18,89 % pada tahun 2007. Penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan merupakan kontribusi yang signifikan dari semua pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta masyarakat melalui kebijakan pembangunan spasial dan sektoral. Meski demikian, keberhasilan penurunan penduduk miskin masih dihadapkan pada dampak krisis keuangan global yang harus diantisipasi agar daya beli masyarakat tetap dipertahankan untuk mampu melakukan transaksi permintaan barang dan jasa.

## 2. Ekonomi

2. Ekonomi

- a. Kinerja perekonomian Jawa Timur paska krisis sampai saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2006 sebesar 5,80 % menjadi 6,11 % pada tahun 2007. Kontribusi terbesar perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 26,46%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 30,77% dan sektor pertanian 16,66%. Khusus untuk sektor industri pengolahan, kontribusi terbesar didukung oleh sub sektor makanan, minuman dan tembakau mencapai 54,96 %.

Secara keseluruhan perbandingan absolut perekonomian antar Kabupaten/Kota se Jawa Timur tergambar seperti grafik berikut :



b. Jawa Timur

- b. Jawa Timur dikenal sebagai daerah lumbung pangan namun sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian di Jawa Timur dari tahun ke tahun semakin turun. Pada tahun 2005, kontribusi sektor pertanian sebesar 17,44%, turun menjadi sebesar 17,14% pada tahun 2006 dan turun kembali menjadi sebesar 16,66% pada tahun 2007. Sedangkan angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 45 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas sektor pertanian relatif masih rendah tetapi memiliki tingkat pemerataan yang cukup tinggi.
- c. Kinerja sektor pertambangan mengalami peningkatan dari 1,96 % pada tahun 2005, menjadi 2,01 % pada tahun 2006 dan menjadi 2,09 % pada tahun 2007. Kedepan produksi dan kontribusi sektor pertambangan khususnya minyak dan gas diharapkan dapat terus mengalami peningkatan dengan beroperasionalnya 14 wilayah (blok) antara lain Brantas, Tuban, Bawean & Kangean, Madura sebelah Barat (Offshore West Madura) & Poleng, Cepu, Selat Madura (Madura Strait), Camar, Pangkah, Blora, Sampang, Lepas Pantai Madura (Madura Offshore), Ketapang dan Karapan.
- d. Pembangunan koperasi dan UMKM telah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan aset koperasi rata-rata mencapai 3,5% pertahun, dimana tahun 2007 telah mencapai Rp. 9,6 trilyun dengan jumlah koperasi sebanyak 17.918 unit. Selanjutnya nilai tambah UKM Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2007 mencapai Rp. 284,38 trilliun atau naik dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp. 250,66 trilliun (ADHB). Dengan demikian, peranan nilai tambah UKM terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2007 sebesar 53,49 %, naik dibandingkan tahun 2006 sebesar 53,26 %, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM cukup mendapat dukungan masyarakat.
- e. Sektor Perbankan tahun 2007 terdapat persetujuan kredit baru oleh perbankan sebesar Rp. 92,15 trilyun atau meningkat 23,82% dibandingkan tahun 2006 sebesar Rp. 74,42 trilyun. Dari jenis penggunaan, struktur atau komposisi kredit masih didominasi oleh kredit modal kerja yang mencapai 66%. Dari sisi sektoral, pangsa kredit

terbesar

terbesar hingga tahun 2007 masih terdapat pada sektor industri pengolahan yang mencapai 29,75%, sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki komposisi sebesar 29,41%. Secara keseluruhan penyaluran kredit pada sektor produktif (meliputi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa) mencapai 66,63% dari total kredit. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur sebagai daerah industri dan perdagangan sangat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar untuk mendukung kegiatan sektor-sektor tersebut. Khusus untuk kredit di sektor pertanian mencapai Rp. 4,967 triliun yang merupakan kredit dari Bank Pemerintah, Bank Swasta dan BPR.

- f. Kinerja investasi yang diharapkan mampu mendukung basis fundamental perekonomian Jawa Timur kinerjanya belum optimal untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini antara lain disebabkan adanya luapan Lumpur Lapindo – Sidoarjo yang terjadi sejak Bulan Mei tahun 2006 dan terus terjadi sampai sekarang. Pada tahun 2007 nilai persetujuan PMA sebesar US \$ 855,23 juta dengan jumlah proyek 85 buah. Sementara itu nilai persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2007 sebesar Rp. 16.705 milyar dengan jumlah proyek sebanyak 22 proyek. Dari persetujuan investasi tersebut, investasi yang bergerak di sektor agrobisnis untuk PMA mencapai 23 proyek dengan nilai investasi US \$ 258,396 juta, sedangkan PMDN di sektor agrobisnis mencapai 6 proyek dengan nilai investasi Rp. 5.573 milyar.

### **3. Sarana Prasarana Wilayah**

- a. Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pada umumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan sebagai industri jasa. Untuk mendukung percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, fungsi pelayanan umum transportasi dilakukan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau baik di perkotaan maupun perdesaan,

mendukung

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional. Kondisi transportasi di Jawa Timur tergambar antara lain melalui kinerja jaringan jalan, prasarana kereta api dan pelabuhan.

Kondisi jalan sampai dengan tahun 2007 adalah:

- 1). Panjang Jalan Provinsi : 1.439,18 Km, dengan kondisi mantap 81,88% dan kondisi tidak mantap 18,12%.
- 2). Panjang Jalan Nasional : 1.899,21 Km dengan kondisi mantap 82,46% dan kondisi tidak mantap 17,54 %.
- 3). Panjang Jalan Eks Provinsi : 561,80 Km dengan kondisi mantap 75,96 % dan kondisi tidak mantap 24,04 %
- 4). Panjang Jalan Provinsi + Eks Provinsi : 2.000,98 dengan kondisi mantap 78,95% dan kondisi tidak mantap 21,05%

Perkembangan pembangunan jalan tol di Jawa Timur sampai dengan tahun 2008, adalah sebagai berikut :

- 1). Jalan Tol yang sudah beroperasi sepanjang 82,50 km yaitu : Jalan Tol Surabaya-Gempol; Jalan Tol Surabaya-Gresik dan Jalan Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda.
- 2). Jalan Tol yang dalam tahap konstruksi sepanjang 94,45 km yaitu : Jalan Tol Surabaya-Mojokerto; Jalan Tol Kertosono-Mojokerto dan Jembatan Surabaya-Madura.
- 3). Jalan Tol dalam tahap pembebasan tanah sepanjang 57,81 km yaitu Jalan Tol Gempol-Pandaan; Jalan Tol Gempol-Pasuruan dan Jalan Tol Porong-Gempol (relokasi).

Untuk prasarana transportasi perkeretaapian dilaksanakan oleh PT. KAI, dengan mempergunakan jaringan rel sepanjang 986.307 Km dan jaringan rel yang tidak beroperasi sepanjang 590,474 Km.

Sedangkan pelabuhan laut di Jawa Timur terbagi menjadi 3 yaitu :

- 1). Pelabuhan Umum sebanyak 7 Unit
- 2). Pelabuhan Umum yang tidak diusahakan sebanyak 9 buah.
- 3). Pelabuhan Khusus.

Berdasar fungsi pelayanan :

- 1). Pelabuhan Utama, terdiri dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Wangi

2). Pelabuhan

- 2). Pelabuhan Regional terdiri dari Pelabuhan Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Panarukan dan Kalianget.
  - 3). Pelabuhan Lokal.
- b. Secara hidrologis Jawa Timur dikelompokkan dalam 7 (tujuh) Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Brantas (Strategis Nasional), WS Bengawan Solo (lintas Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah), WS Welang Rejoso (lintas Kabupaten/Kota Pasuruan dan Probolinggo), WS Pekalen Sampean (lintas Kabupaten Probolinggo, Lumajang dan Situbondo), WS Baru Bajulmati (lintas Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi), WS Bondoyudo Bedadung (lintas Kabupaten Lumajang dan Jember) dan WS Madura (lintas Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep), yang masing-masing WS tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Dari segi potensi alamiah, sumber daya air Provinsi Jawa Timur memiliki kapasitas tampung yang relatif kecil dibanding dengan Provinsi lain di Pulau Jawa. Potensi air tahun 2007 terukur dengan jumlah aktiva 59.146,40 juta  $M^3$  terdiri dari air permukaan 47.936,51 juta  $M^3$  dan air tanah sebesar 11.209,89 juta  $M^3$ . Air yang tersedia dari tampungan buatan, tampungan alam dan lainnya yang terkelola dari sistem penyediaan air adalah sebesar 19.339,95 Juta  $M^3$  per tahun dari jumlah kebutuhan sebesar 22.064,11 Juta  $M^3$  (37,3%) yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan domestik, pertanian, peternakan, perikanan, industri dan *maintenance flow*. Diperkirakan devisit pelayanan air sebesar 2.724,15 Juta  $M^3$  per tahun sedangkan sisa air yang belum dimanfaatkan adalah sebesar 37.082,29 juta  $M^3$  (62,7 %) berupa air hujan yang belum dapat ditampung dalam waduk-waduk, embung dan lain-lain yang terbuang kelaut pada saat musim hujan.

Dukungan prasarana irigasi yang mengalami degradasi masih belum dapat diandalkan karena hanya mengandalkan jaringan irigasi yang pasokan airnya relatif terkendali karena berasal dari bangunan-bangunan penampung air, dan sisanya hanya mengandalkan ketersediaan air di sungai. Selain itu, laju pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air juga masih belum mampu mengimbangi laju degradasi lingkungan penyebab banjir sehingga

bencana



bencana banjir masih menjadi ancaman di beberapa wilayah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi wilayah, banyak daerah telah mengalami defisit air permukaan, sedangkan di sisi lain konversi lahan pertanian telah mendorong perubahan fungsi prasarana irigasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengendalian. Pada sisi pengembangan institusi pengelolaan sumber daya air, lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah otonom telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Sedangkan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan yang dimiliki.

- c. Kebutuhan tenaga listrik Jawa Timur dilayani dari *energy transfer* sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (JAMALI) dan PLTD. PLTD yang dimiliki oleh PLN Distribusi Jawa Timur dengan kapasitas terpasang total 6.497 kW digunakan pada *isolated area* seperti di pulau-pulau: Giligenting, Kangean, Mandangin, Sapeken, Sapudi, Talango, Perikanan dan Tambak. Kapasitas ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan potensi kebutuhan listrik yang ada. Sampai dengan tahun 2007 jumlah desa berlistrik adalah 8.421 desa dari total sebanyak 8.497 desa di Jawa Timur. Dengan demikian sudah 99,25 % desa di Jawa Timur yang terjangkau pasokan listrik, namun tingkat elektrifikasinya (rumah yang sudah teraliri listrik) baru mencapai 73%.
- d. Kinerja pembangunan sarana dan prasarana permukiman (perumahan, air limbah, persampahan dan drainase) telah mengalami banyak kemajuan, namun cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan masih jauh dari memadai. Hal ini terindikasi dari tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan tahun 2007 baru mencapai 40,8%, sedangkan di kawasan perdesaan hanya mencapai 46,5%. Cakupan pelayanan sarana dan prasarana pengolahan air limbah dasar di perkotaan telah mencapai 76,5% dan di perdesaan 47,4%, untuk tingkat pengelolaan persampahan mencapai 52%. Kebutuhan perumahan di perkotaan mengalami *backlog* sebesar 10,3% sedangkan di perdesaan sebesar 4,7%.

## B. Modal Dasar

## B. Modal Dasar dan Potensi

Modal dasar pembangunan Jawa Timur adalah seluruh sumber kekuatan nasional dan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam pembangunan.

1. Wilayah Provinsi Jawa Timur yang bercirikan kepulauan dan kelautan serta berada di ujung timur pulau Jawa menjadi pintu gerbang dan penghubung Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia ;
2. Kekayaan alam yang terkandung di darat, laut, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
3. Budaya Jawa Timur yang heterogen menjadi ciri Bhinneka Tunggal Ika yang terbuka terhadap nilai-nilai tradisional dan modern yang positif.
4. Penduduk Jawa Timur yang besar jumlahnya dan menempati urutan kedua terbesar di Indonesia merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan.
5. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

## C. Gambaran Tata Ruang Wilayah

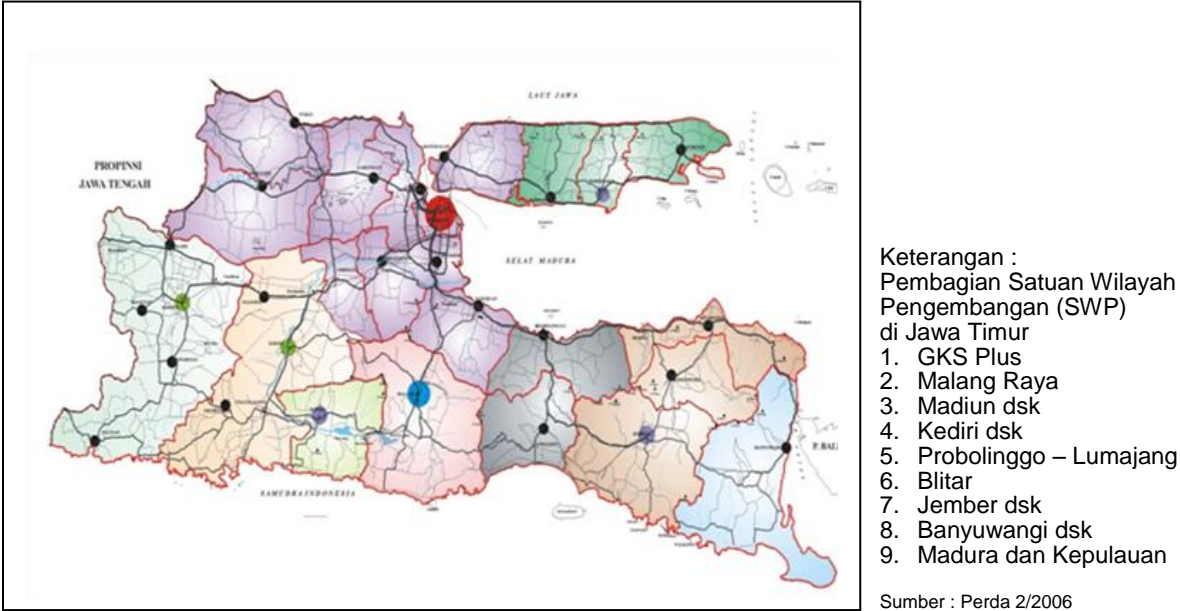
Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau dengan luas wilayah daratan sebesar 47.130,15 Km<sup>2</sup> dan lautan seluas 110.764,28 Km<sup>2</sup>. Wilayah ini membentang antara 111° 0' BT – 114° 4' BT dan 7° 12' LS – 8° 48' LS. Sisi Utara wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan dengan Samudra Indonesia, Timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali dan Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum perkembangan struktur ruang Jawa Timur telah mengarah pada dominasi kawasan perkotaan mempengaruhi perekonomian wilayah pedesaan. Urbanisasi dan aglomerasi wilayah adalah fenomena yang terus berkembang mengarah ke hirarkhi perkotaan yang lebih besar. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang berkembang cenderung terus membesar dan berpotensi mendorong perkembangan *mega urban*, menyeimbangkan perkembangan perkotaan dan mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan serasi dengan kawasan

perdesaan

perdesaan sesuai daya dukung dan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, maka struktur ruang wilayah Jawa Timur dibagi dalam 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Persebaran 9 SWP beserta tingkat kesenjangan wilayahnya dapat dilihat pada peta dan tabel berikut :

Peta 2.3 Perwilayahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur



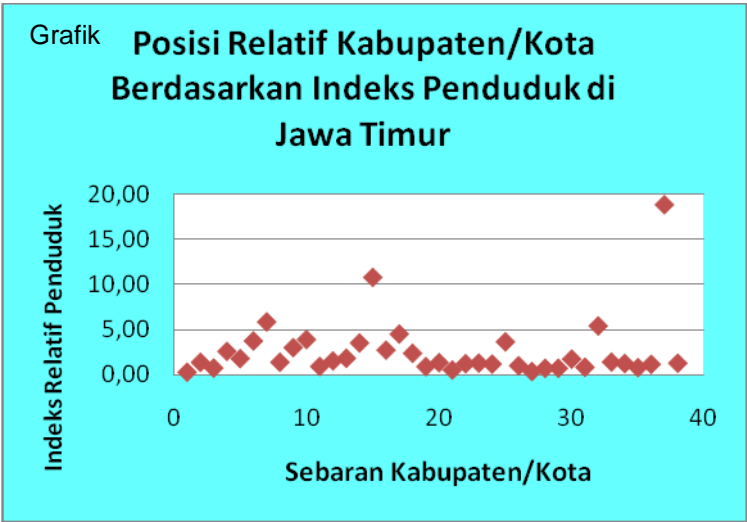
**Tabel 2.1**  
Koefisien Varians Williamson Jawa Timur  
Tahun 2004-2008

Tahun	Indeks $V_w$	Perubahan
2004	114,54	1,12121
2005	116,25	1,49293
2006	116,00	-0,21505
2007*)	115,38	-0,52586

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur  
Keterangan: \*) Angka Diperbaiki

Kesenjangan antar wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan dari tahun 2004 ke tahun 2005 seperti tertera dalam tabel di atas, ternyata mampu diantisipasi perkembangannya dan bahkan mengalami penurunan yang signifikan pasca diterapkannya sistem perwilayahan pembangunan dengan 9 SWP tersebut tahun 2006 dan 2007. Meski demikian jika dilihat dari indeks gabungan sarana/prasarana wilayah dan kependudukan masih terlihat adanya kesenjangan infrastruktur seperti terlihat pada gambar 2.4.

Gambar 2.4

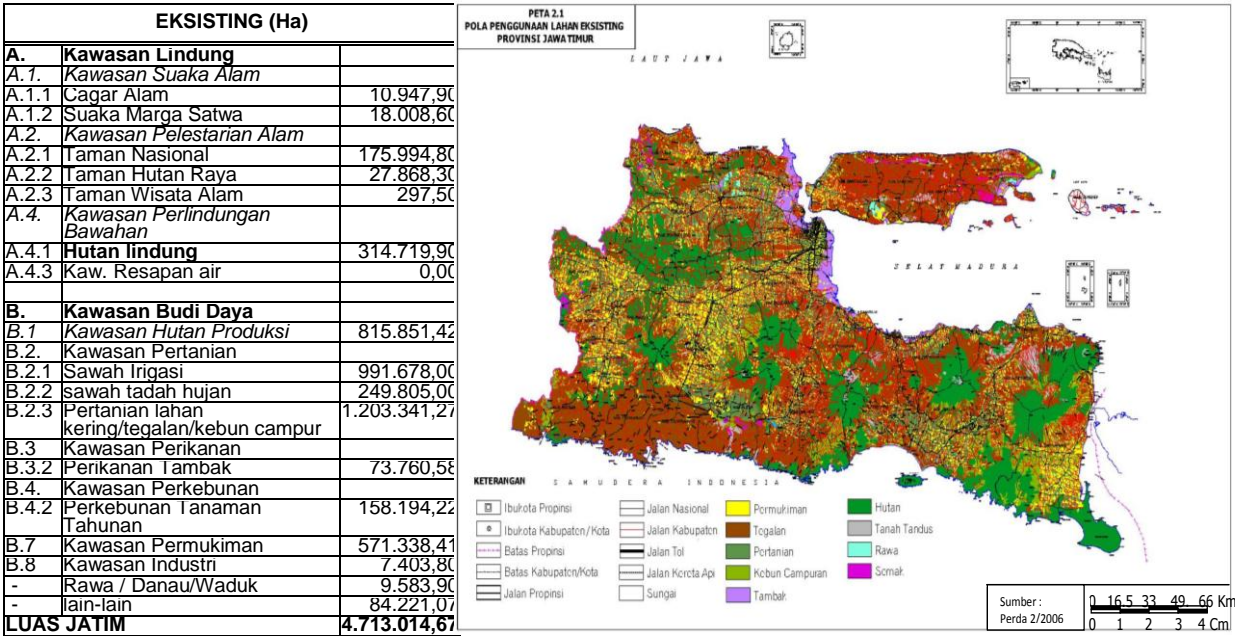


Gambar 2.4  
Indikator Kesenjangan Berdasar Indeks Gabungan  
1. Sarana (Fasilitas)  
2. Prasarana (Transportasi)  
3. Kependudukan (Jumlah Penduduk)

Berdasar kondisi tersebut perlu perencanaan ruang wilayah yang lebih terstruktur menopang sinergi antar sektor antar wilayah dalam pembentukan sistem pelayanan yang berhirarki di seluruh wilayah Jawa Timur sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

Pola Ruang Wilayah Jawa Timur pada tahun 2005 terbagi atas 11,62% Kawasan Lindung dan 88,38 % Kawasan Budidaya. Untuk melihat lebih lengkap penggunaan lahan eksisting wilayah Jawa Timur tersebut, tersaji dalam tabel dan peta sebagai berikut :

Gambar 2.5. Peta dan Tabel Penggunaan Lahan Eksisting di Provinsi Jawa Timur

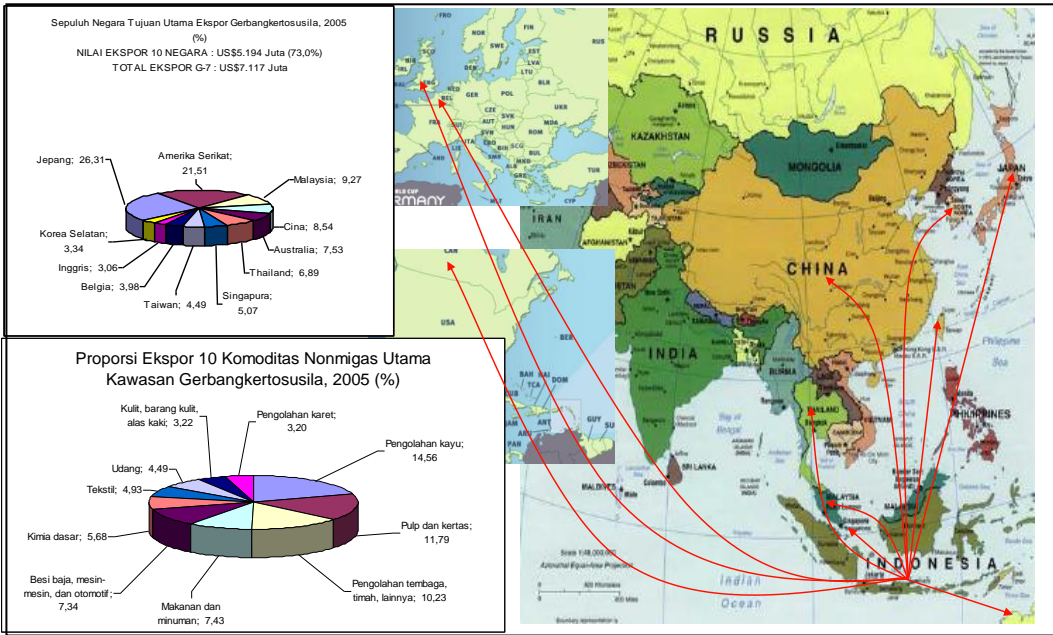


Potensi kawasan budidaya yang sangat besar ini perlu dikelola mengarah pada tercapainya tujuan pemanfaatan ruang wilayah yang aman, nyaman

nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dominasi 74,11 % wilayah Jawa Timur yang dibudidayakan untuk Sektor Pertanian manakala digabungkan dengan data *leading sektor* pada struktur ekonomi dengan konstributor tertingginya yang berada pada Sektor Perdagangan, Industri dan Pertanian, maka adalah layak manakala produktivitas lahan di RTRW Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mengembangkan kawasan yang berorientasi agrobisnis.

Pengembangan wilayah Jawa Timur yang mengarah ke agrobisnis ini tentu dengan mempertimbangkan pula tingkat keamanan, kenyamanan dan keberlanjutan pembangunannya. Untuk itu penetapan prioritas pengembangan wilayah dalam bentuk Kawasan Strategis Ekonomi Agropolitan di wilayah pedesaan yang didukung jaringan sistem prasarana wilayah pada Kawasan Strategis pusat-pusat distribusi perkotaan yang memiliki daya saing global adalah arahan yang layak untuk direncana dan direalisasikan. Apalagi jika dikaitkan dengan data ekspor beserta orientasi tujuannya seperti yang tergambar pada grafik dan peta sebagai berikut :

Gambar 2.6. Grafik dan Peta Orientasi Ekspor GKS Jawa Timur

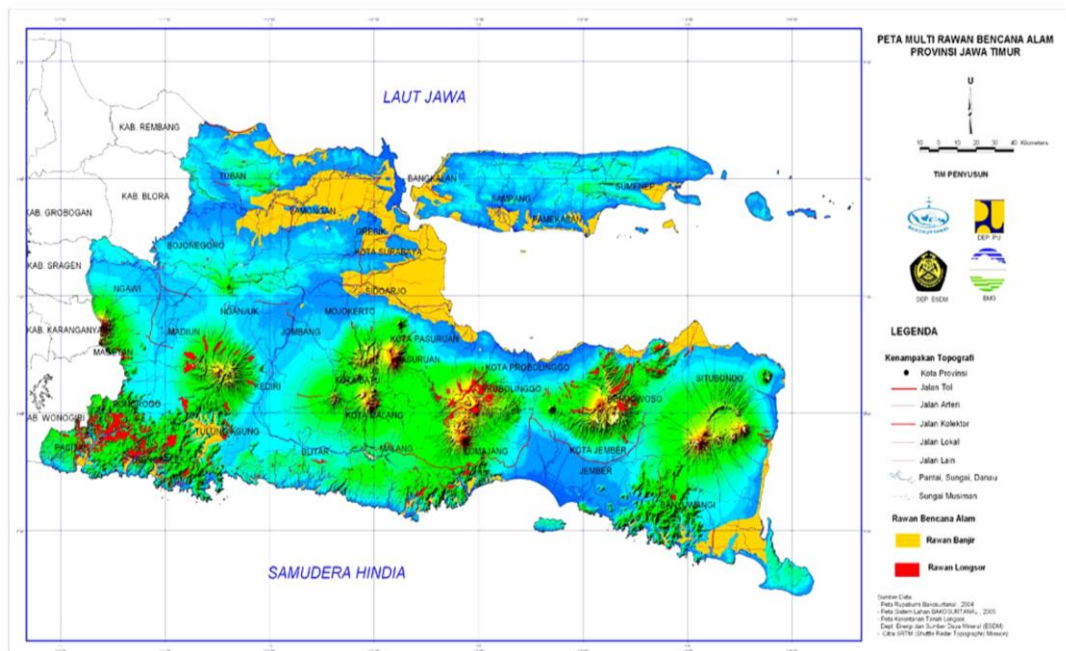


Grafik di atas mengilustrasikan *forward* dan *backward linkage* dominasi sektor Agro pada proporsi ekspor di GKS yang merupakan inti wilayah perkotaan Jawa Timur. Data tersebut juga meyakinkan besarnya peran provinsi ini dalam kancah perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Peran Jawa Timur sebagai pusat distribusi dan pengembangan wilayah di Indonesia Timur inilah yang layak untuk dipertahankan.



Perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan tata ruang wilayah perlu pula mengantisipasi terjadinya bencana alam, baik bencana banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi maupun tsunami. Persebaran wilayah yang rawan terjadi bencana alam tergambar seperti pada gambar 2.7 berikut :

Gambar 2.7 Peta Kerentanan Multi Bencana Alam Provinsi Jawa Timur



Kawasan rawan bencana alam seperti pada peta tersebut di atas merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor dan banjir seperti yang terjadi pada sepanjang tahun 2006 – 2007 di beberapa daerah itu yang berakibat rusaknya lingkungan. Bencana yang juga berpengaruh kuat pada perekonomian Jawa Timur lainnya adalah luapan lumpur (Lapindo) di Kabupaten Sidoarjo yang mengakibatkan terendamnya permukiman penduduk, tertutupnya sebagian akses jalan Tol Waru – Gempol dan terganggunya fungsi prasarana wilayah lain di sekitar lokasi semburan, yang muncul dari tahun 2006 dan hingga kini belum berhenti.

Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Citra Satelit  
Luapan Lumpur Lapindo  
di Kabupaten Sidoarjo

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah juga perlu melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi. Antisipasi dapat dilakukan dengan pembentukan tatanan antara lain melalui deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Dengan kata lain manajemen risiko bencana perlu direncanakan dengan mensinergikan perencanaan tata ruang (spasial) dan perencanaan pembangunan daerah (sektoral) secara lebih terstruktur dan sistematis.

#### **D. Posisi Jawa Timur dalam Konstelasi Nasional**

Dalam sejarah, Jawa Timur pernah menjadi pusat kekuasaan dan pemerintahan raja - raja dari abad X sampai abad XIII atau dalam periode Raja Kediri, Singosari dan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berdiri tahun 1292 berhasil mencapai puncak kejayaan dengan mempersatukan Nusantara. Kemudian dalam perkembangannya, pusat kekuasaan berpindah ke Jakarta dan Jawa Timur menjadi pusat pertanian, industri, pendidikan dan kegiatan keuangan.

Pada tahun 1993, kinerja perekonomian Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 18,20 %, dalam perkembangannya pada tahun 2007 kontribusinya terhadap PDB menjadi 14,59%. Jawa Timur juga dikenal sebagai lumbung pangan yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi ketersediaan pangan nasional. Kontribusi produksi pertanian Jawa Timur terhadap nasional pada tahun 2007 untuk padi sebesar 16,48%, jagung sebesar 32%, kedele sebesar 42,54%, buah-buahan sekitar 28,06%,

daging

daging sebesar 6,05% dan telur sebesar 33,22%, gula sebesar/tebu sebesar 46% serta tembakau sebesar 60%. Dengan kata lain, Jawa Timur mempunyai peranan strategis dalam penyediaan cadangan pangan nasional. Sektor lapangan usaha lainnya yang juga potensial adalah perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Fenomena demikian ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur sudah menampakkan perkembangan kearah kemantapan, dalam arti perkembangan industri dan jasa yang akan di dukung oleh besarnya potensi pertanian.

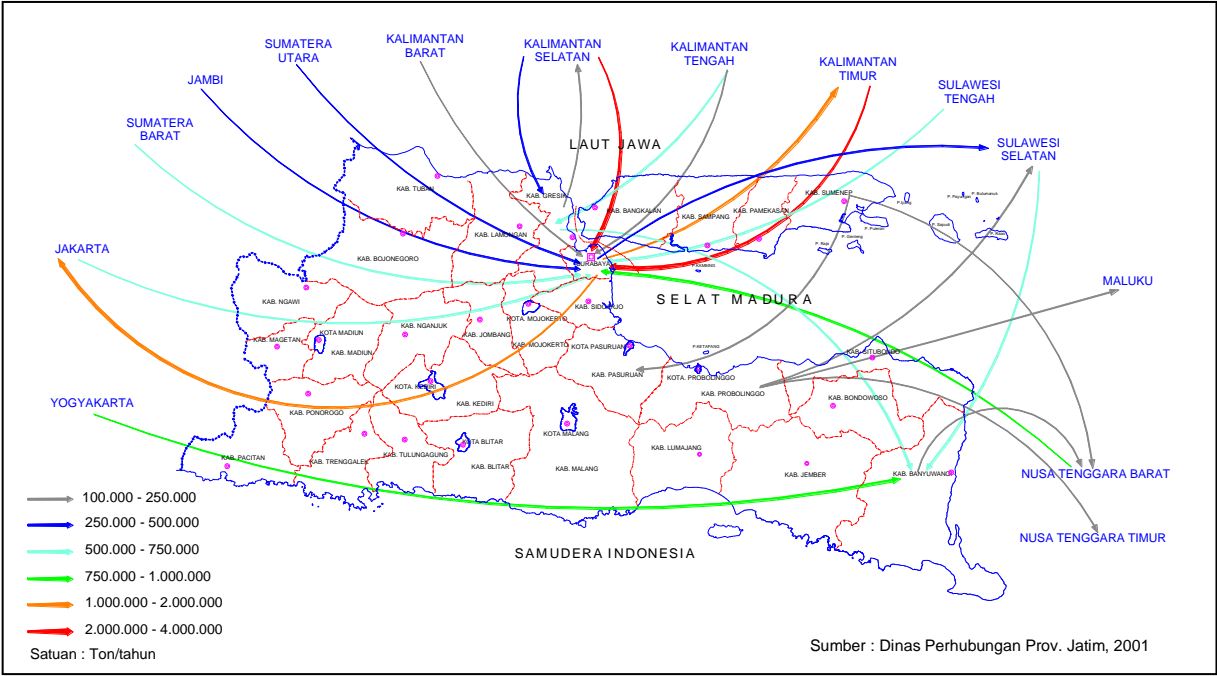
Sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia saat ini , Jawa Timur masih menyimpan persoalan secara mendasar. Kemiskinan dan pengangguran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari persoalan yang mengharapakan terjadinya. Peningkatan kesempatan partisipasi pendidikan yang meningkat belum di imbangi dengan adanya penciptaan kesempatan kerja secara merata. Pada saat yang sama pengangguran terbuka tertinggi terjadi diwilayah dengan angka partisipasi sekolah yang tinggi. Keterpaduan kebijakan wajib belajar dan pengembangan kebijakan ekonomi yang mampu menarik kesempatan kerja di wilayah masih belum terlihat berjalan secara wajar. Aktivitas yang masih terpusat di koridor Utara Jawa Timur menyebabkan akumulasi tenaga kerja terdidik masih terserap di wilayah ini. Problem kemiskinan yang terjadi di wilayah ini lebih kepada problem kemiskinan infrastruktur; artinya infra struktur fisik dan sosial serta ekonomi selama ini masih terpusat di wilayah pusat pemerintahan Provinsi.

Meski demikian, peningkatan aktivitas ekonomi Jawa Timur pada dasawarsa terakhir ini layak untuk diperhitungkan sebagai suatu kekuatan ekonomi yang bisa mencapai 20 - 25 % dari perekonomian Indonesia. Peran Jawa Timur melayani Indonesia bagian Timur terindikasi cukup besar, baik dari sisi kebutuhan pangan, papan, kebutuhan bahan bangunan maupun kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan; Jawa Timur masih menjadi pengendali utama untuk menggerakkan ekonomi Indonesia Timur. Hal ini dapat terlihat dari pola angkutan laut dan udara yang makin memantapkan Provinsi ini sebagai suatu simpul penghubung utama Indonesia Timur dengan Jawa Timur.

Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Pola Asal Tujuan Angkutan Barang Melalui Moda Laut



Sedangkan perkembangan realisasi nilai ekspor non migas di Jawa Timur menunjukkan kinerja meningkat dimana pada tahun 2006 sebesar US \$ 9.019 juta meningkat menjadi US \$ 11.770 juta pada tahun 2007, dengan nilai kontribusi ekspor Jawa Timur terhadap nasional sebesar 12,92%. Negara tujuan ekspor utama adalah Jepang, USA, Malaysia dan RRC. Nilai impor non migas Jawa Timur selama tahun 2006 sebesar US \$ 6.864 juta dan meningkat menjadi US \$ 8.639 juta pada tahun 2007 atau meningkat menjadi 12,6%. Negara asal impor utama adalah Singapura, RRC, Korea Selatan, USA dan Malaysia. Khusus untuk ekspor komoditi pertanian dan industri agro pada tahun 2007 mencapai US\$ 5.186 atau 45,38% dari total ekspor non migas Jawa Timur tahun 2007. Kondisi demikian menunjukkan bahwa komoditas agrobisnis memberikan peran yang cukup besar pada perdagangan Jawa Timur.